

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemprov DKI Bedah Kampung Kumuh

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak masyarakat terlibat aktif dalam bedah kampung kumuh. Biasanya kegiatan tersebut dikerjakan perusahaan swasta melalui tender, namun kali ini pelaksanaannya melalui swakelola.

Menurut Anies, untuk membangun Kota Jakarta diperlukan kolaborasi bersama masyarakat secara langsung sehingga manfaat pembangunan dan pergerakan ekonomi dapat dirasakan warga.

Dia bersyukur ada ketentuan baru dari pemerintah pusat yang mengatur pengerjaan kegiatan pembangunan melalui gotong-royong. "Sekarang kita punya payung hukum untuk pembiayaan pembangunan secara gotong-royong. Kalau kemarin kita kesulitan landasan hukumnya, akhirnya hibah," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menjelaskan, pembangunan secara gotong-royong oleh masyarakat atau swakelola tipe IV diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah. Semua kegiatan maupun program pembangunan di kampung-kampung yang telah direncanakan dalam anggaran dapat dieksekusi oleh organisasi kemasyarakatan di kampung tersebut seperti karang taruna, PKK, dan pengurus RT/RW.

Seperti yang dilakukan sebelumnya oleh pihak ketiga melalui proses tender, swakelola tipe IV tetap harus mengikuti standar yang ditetapkan Pemprov DKI.

Anies saat ini tengah menyusun peraturan gubernur (pergub) yang mengatur soal pemberian dana pada masyarakat yang akan membangun lingkungan. Pergub itu mencakup mekanisme pelaksanaan pembangunan, pengucuran dana, hingga pertanggungjawaban anggaran tersebut.

"Di situlah kenapa diperlukan pergub yang mengatur de-

tailnya dan sekarang dalam proses. Target kita malah ingin lebih banyak dana bisa dikelola masyarakat supaya APBD ikut menggerakkan perekonomian masyarakat," ujar Anies.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso meminta Pemprov DKI menyusun aturan yang dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel apabila ingin menggunakan swakelola tipe IV sehingga masyarakat tidak menyimpang dari ketentuan yang direncanakan.

Menurut dia, pembangunan swakelola tipe IV dengan melibatkan kelompok masyarakat tentunya lebih efektif daripada swakelola yang sepenuhnya dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti pada kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kalau swakelola tipe IV ini kelompok, bukan perorangan. Terpenting ada aturan. Saya yakin Anies bisa melakukan itu. Apalagi, beliau punya tim gubernur untuk harmonisasi perundangan," katanya.

Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Mu-

adzin Mungkasa mengatakan, penataan permukiman di Jakarta selama ini sifatnya sporadis dan hanya mempercantik luarnya. Ironisnya, hidup masyarakat yang lingkungannya dipercantik tetap miskin dan susah.

Untuk itu, penataan harus dilakukan bersama-sama sehingga ada *collaborative approach* memecahkan seluruh masalah. Dia optimistis konsep penataan permukiman di Jakarta bisa menjadi contoh bagi penataan kota-kota lain di Indonesia. "Kita ingin jadi *center of excellence* menangani rumah kumuh di Indonesia," ungkapnya.

Menurut pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga, banyak permukiman kumuh yang menempati lahan negara misalnya Kampung Akuarium, Jakarta Utara yang dijadikan percontohan. Kampung Akuarium merupakan kawasan pendukung cagar budaya seperti Pasar Ikan dan Kota Tua. Disisilainnya juga terdapat area ruang terbuka hijau guna mendukung aliran air ke laut. Se-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemprov DKI Bedah Kampung Kumuh

SEGERA DIBENAH

Pemprov DKI Jakarta akan menata belasan kampung kumuh. Penataan tersebut dengan melibatkan partisipasi langsung masyarakat.



INFO GRATIS: KORAN SINDOSUSILO, FOTO: ANTARA

PERUNTUKKAN DANA SWAKELOLA MASYARAKAT

Penataan kampung kumuh



Pembangunan jalan

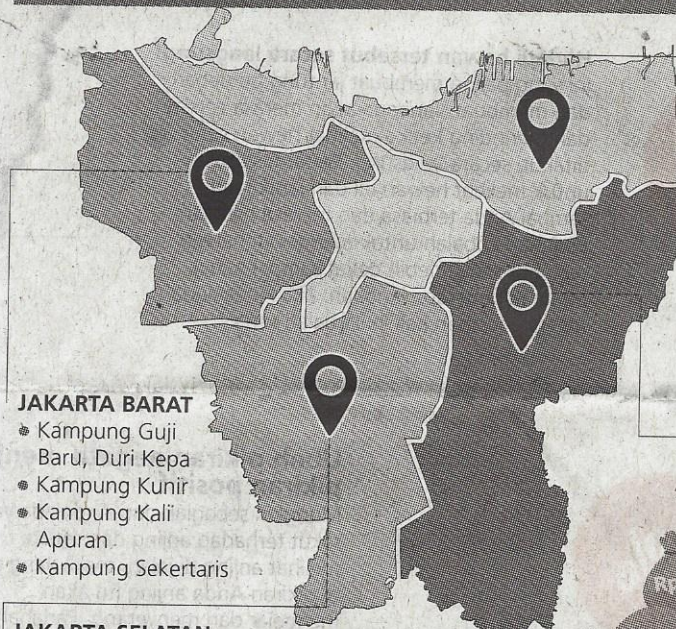


Penyediaan makanan sehat di sekolah-sekolah



Sumber: Pemprov DKI Jakarta/diolah dari berbagai sumber

16 KAMPUNG KUMUH DI JAKARTA AKAN DIREHABILITASI



JAKARTA UTARA

- Kampung Loḍan
- Kampung Tongkol
- Kampung Krapu
- Kampung Muka
- Kampung Walang
- Kampung Akuarium
- Kampung Marlina
- Kampung Elektro
- Kampung Gedong Pompa
- Kampung Kerang Ijo
- Kampung Baru Tembok Bolong
- Kampung Tanah Merah

JAKARTA TIMUR

- Kampung di wilayah Prumpung, Jatinegara

JAKARTA BARAT

- Kampung Guji Baru, Duri Kepa
- Kampung Kunir
- Kampung Kali Apuran
- Kampung Sekertaris

JAKARTA SELATAN

- Kampung Baru, Pondok Pinang, Kebayoran Lama

ANGGARAN DKI JAKARTA

APBD 2017: Rp70,1 triliun

APBD 2018: Rp77,1 triliun

APBD 2019: Rp89 triliun

mentara dalam peta tata ruang DKI Jakarta, Kampung Akuarium tercatat sebagai zona milik pemerintah daerah.

Jika mengikuti aturan berlaku, menurut dia, akan sulit membenahi kampung-kam-

pung yang berdiri di tanah negara. Bila satu lokasi dilegalkan untuk permukiman, maka akan menyulitkan Pemprov DKI dalam penataan lain misalnya program normalisasi sungai.

• bima setiyadi